

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Organisasi sektor publik adalah organisasi yang bertujuan menyediakan atau memproduksi barang-barang publik. Organisasi sektor publik di Indonesia mengalami perkembangan yang luar biasa beberapa waktu terakhir ini. Perkembangan ini juga dialami oleh pemerintah (baik pusat maupun daerah), sebagai salah satu bentuk organisasi publik. Kondisi ini semakin menguatkan tuntutan akuntabilitas atas organisasi pemerintahan. Salah satunya akuntabilitas finansial, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada para pemangku kepentingan yang dilaksanakan secara periodik.

Pemerintahan dikatakan baik jika terpenuhinya prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas dan transparansi publik terutama dalam pelaporan keuangan akuntansi. Penyajian laporan keuangan ini dimaksudkan untuk mencapai akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan suatu organisasi. Dalam penyajian laporan keuangan tersebut harus memenuhi aspek transparansi, ekonomis, efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas.

Pemerintah daerah dapat menerapkan tiga mekanisme untuk menjadi lebih reseptif, transparan dan akuntabel dalam mencapai *good governance*, yaitu:

1. Mendengarkan suara-suara atau keinginan orang, menjalin kerjasama untuk pemberdayaan masyarakat.
2. Memperbaiki aturan internal dan mekanisme kontrol

3. Menciptakan lingkungan yang kompetitif dalam penyediaan layanan kepada masyarakat dan komersialisasi layanan.

Tiga mekanisme tersebut saling terkait dan saling mendukung satu sama lain untuk meningkatkan efisiensi manajemen pemerintah daerah (Karim & Mursalim, 2019). Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Upaya nyata untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan posisi keuangan penting yang berasal dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh organisasi sektor publik dan merupakan media sebuah entitas untuk mempertanggungjawabkan aktivitasnya kepada publik selain itu juga berfungsi untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja pemerintahan, maka dari itu informasi yang disajikan harus memiliki nilai, agar informasi keuangan tersebut dapat bermanfaat bagi para penggunanya. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik ; relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Laporan keuangan berkualitas tinggi menunjukkan bahwa pemimpin daerah menjalankan tanggung jawab organisasi dan manajerial sesuai dengan wewenang yang diberikan kepada mereka.

Al-Qur'an juga telah menyebutkan mengenai kewajiban manusia untuk menyampaikan amanah pada yang berhak dalam surah An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (Q.S.An-Nisa’:58)

Ayat ini secara tidak langsung menjelaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk menjelaskan tugas yang diberikan kepadanya dan menerbitkan laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berhak menerima laporan keuangan. Selain itu, ayat tersebut juga menegaskan bahwa laporan keuangan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah harus disusun dan diterbitkan secara lengkap, dan tepat waktu bagi orang yang berhak memperolehnya.

Laporan keuangan pemerintah daerah akan memperoleh pendapat dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) di setiap tahunnya. Ada 4 (empat) opini yang diberikan oleh BPK, yaitu WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang artinya LKPD tersebut sudah baik/ wajar sesuai dengan SAP yang telah ditetapkan, dan tidak ada yang dikecualikan. Opini yang kedua, yaitu WDP (Wajar Dengan Pengecualian) yang berarti LKPD tersebut kurang efektif tetapi masih menunjukkan wajar sesuai

dengan SAP, akan tetapi ada suatu keadaan yang dikecualikan. TW (Tidak Wajar) yang artinya laporan tersebut tidak menunjukkan keadaan yang senyatanya. Dan, yang ketiga adalah TMP (Tidak Menyatakan Pendapat), yaitu tidak adanya pemeriksaan yang menyeluruh oleh auditor/pemeriksa, sehingga auditor tidak yakin. Komponen laporan keuangan pemerintah daerah adalah laporan pelaksanaan anggaran, neraca, laporan arus kas, laporan surplus anggaran, dan catatan atas laporan keuangan.

Apabila Badan Pemeriksa Keuangan memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian kepada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berarti Laporan Keuangan yang dilaporkan sudah memenuhi syarat atau dapat dikatakan sudah disajikan dan diungkapkan secara relevan, andal, dapat dipercaya serta dapat dibandingkan. Adapun hasil opini oleh BPK terhadap Pemerintah Kabupaten Bantul dari tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Opini BPK RI atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada
Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

Tahun Anggaran	Opini LKPD
2016	WTP
2017	WTP
2018	WTP
2019	WTP
2020	WTP

Sumber : yogyakarta.bpk.go.id/hp-lkpd/

Tabel 1.1 merupakan hasil dari audit yang dilakukan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) atas LKPD Kabupaten Bantul. Yang mencatatkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut selama 5 tahun terakhir. Dengan data di atas dapat

disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul telah menjalankan Standar Akutansi Pemerintah (SAP) dengan benar sehingga dapat mendapatkan hasil yang baik juga. Meskipun demikian, BPK masih menemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, permasalahan tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian Laporan Keuangan. Permasalahan tersebut diantaranya pengelolaan izin dan pajak reklame belum tertib serta pengelolaan piutang daerah belum memadai. Opini WTP dari BPK tersebut tentunya memberikan motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Bantul untuk terus meningkatkan perbaikan dalam pengelolaan keuangan daerah dan sekaligus dapat menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Bantul untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah dan meningkatkan sistem pengendalian.

Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas yang efektif tergantung kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami. Salah satu bentuk upaya konkret untuk dapat mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Peneliti memilih variabel akuntabilitas karena sesuai dengan prinsip akuntabilitas untuk menghasilkan akuntabilitas pemerintah berupa

penerbitan laporan keuangan pemerintah daerah yang baik dan transparan. Terwujudnya akuntabilitas keuangan daerah akan menjadi landasan awal untuk tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Komitmen organisasi menurut Mowday *et al.*, (1982) dalam (Eveline, 2016) menunjukkan komitmen yang kuat dalam organisasi dapat menimbulkan kepercayaan dan dukungan, serta loyalitas karyawan terhadap nilai dan tujuan yang ingin dicapai organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi sangat penting, karena erat kaitannya dengan kinerja pegawai yang dituntut oleh seluruh pegawai, kinerja yang baik dalam pekerjaannya, dalam hal ini berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan tahunan, dan pengawasan.

Sistem pengendalian internal merupakan salah satu tolak ukur yang harus digencarkan pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan. Sistem pengendalian internal bisa dijadikan indikator awal dalam menilai kinerja suatu entitas. Sistem pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi, dan juga memegang peran penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (Fraud) secara dini.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widari dan Sutrisno (2017) mengemukakan bahwa sistem pengendalian internal dan komitmen organisasi berdampak positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Tanjung dan Sonia (2021) juga mengemukakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap

kualitas laporan keuangan, dan penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2020) mengemukakan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Tanjung dan Sonia (2021) mengenai “Sistem Pengendalian Internal dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota Cimahi”. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu, pada penelitian sebelumnya menggunakan variabel independen Kualitas Sumber Daya Manusia, sedangkan penelitian saat ini menggunakan variabel independen Akuntabilitas dan Sistem Pengendalian Internal serta menambahkan variabel moderasi yaitu Komitmen Organisasi. Alasan menambah variabel komitmen organisasi sebagai variabel moderasi yaitu untuk memperkuat atau memperlemah hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen. Perbedaan selanjutnya terletak pada subjek dan objek penelitian, penelitian sebelumnya menggunakan pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan pegawai Inspektorat Kota Cimahi sebagai subjek dan objek penelitiannya. Sedangkan penelitian saat ini menggunakan pegawai OPD Kabupaten Bantul. Alasan memilih OPD Kabupaten Bantul sebagai objek penelitian karena yang mencatatkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut selama 5 tahun terakhir. Dengan data di atas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul telah menjalankan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan benar. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti ingin membuat

penelitian dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul?
3. Apakah komitmen organisasi memoderasi pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh positif akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengaruh prinsip sistem pengendalian internal terhadap laporan Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengaruh prinsip komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat pada penelitian ini adalah:

1. Bidang Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian lain khususnya untuk penelitian di bidang akuntansi sektor publik. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan acuan bagi penelitian selanjutnya.

2. Bidang Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan supaya lebih memperhatikan kembali kualitas laporan keuangan daerahnya bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Serta diharapkan dapat menambah wawasan tentang beberapa hal yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan.